

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Persaingan global yang terwujud melalui pasar bebas telah mendorong negara-negara ASEAN untuk membentuk sebuah integritas ekonomi yang dinamakan *Asean Economic Community (AEC)*. Pemberlakuan *Asean Economic Community (AEC)* akan memberikan peluang karena terjadinya arus bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil. Dengan adanya AEC akan mendorong kawasan ASEAN menjadi lebih terintegrasi, dinamis dan kompetitif dalam menghadapi persaingan dagang kawasan dan global (Koran SINDO, 2016). Dari kondisi tersebut, para pelaku usaha dituntut untuk terus memajukan usahanya dan bersaing dengan pengusaha lain, tidak hanya pengusaha dari dalam negeri tetapi juga pengusaha dari negara asing. Hal tersebut dilakukan mengingat kemajuan teknologi yang semakin modern, sehingga para pelaku usaha diharapkan mampu melihat peluang yang ada. (Wahyuddin, 2010).

Ketahanan dan daya saing UMKM di Indonesia menjadi poin penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan *Asean Economic Community*. Hal tersebut dikarenakan, selama ini UMKM banyak memberikan kontribusi dalam membantu penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan pendapatan domestik negara (Wahyuddin, 2010). Akan tetapi dalam meningkatkan kemampuan usahanya, para pelaku UMKM seringkali menghadapi berbagai permasalahan. Seperti yang dijelaskan dalam penelitian

Nurhayati dan Martika (2015) permasalahan yang sering dihadapi oleh para pelaku UMKM adalah mengenai pemasaran produk, teknologi, pengelolaan keuangan, kualitas sumber daya manusia, dan permodalan. Salah satu masalah yang seringkali terabaikan oleh para pelaku usaha UMKM yaitu mengenai pengelolaan keuangan. Dampak dari diabaikannya pengelolaan keuangan mungkin tidak terlihat terlalu jelas. Namun tanpa metode akuntansi yang efektif, usaha yang memiliki prospek untuk berhasil dapat menjadi bangkrut. Dari berbagai masalah tersebut jika para pelaku UMKM tidak berusaha mengatasinya, maka dapat menurunkan kemampuan usaha yang akan berpengaruh terhadap pendapatannya.

Hapiz (2015) menyatakan bahwa dalam dunia usaha, pendapatan selalu diperoleh dalam bentuk nominal uang. Selanjutnya uang tersebut dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana pendapatan perusahaan dalam memperoleh pendapatan dari hasil penjualan dengan mengharap keuntungan sesuai dengan tujuan yang telah dicita-citakan. Pendapatan merupakan unsur yang paling utama dalam menentukan tingkat laba yang dapat dilihat sebagai prestasi pelaku usaha UMKM dalam mengoperasikan usahanya dalam suatu periode tertentu.

Sektor UMKM ini sangat strategis untuk dapat dikembangkan dalam usaha meningkatkan ekonomi rakyat dan merupakan solusi untuk mengurangi ketimpangan maupun kesenjangan pendapatan masyarakat Indonesia, karena sektor ini memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi (Mahmudah, 2015). Hal ini yang mendorong pemerintah untuk terus menciptakan dan mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan. Salah satu program pemerintah

dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada lembaga keuangan dengan pola penjaminan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pada November 2007 (Simorangkir, 2018).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu upaya pemerintah dengan mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit permodalan kepada UMKM dengan bunga rendah. Dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), diharapkan dapat membantu mengembangkan UMKM serta ikut andil dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Wiratna dan Utami (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa KUR memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Modal KUR dapat digunakan UMKM untuk mengembangkan usaha, seperti membeli bahan mentah, membuka cabang baru, membeli alat produksi, dan lain sebagainya. Selain itu Modal KUR juga bisa digunakan sebagai sumber kredit investasi seperti modernisasi usaha, perluasan bisnis, membeli mesin, tanah maupun membangun pabrik. Modal usaha yang diberikan pemerintah dalam bentuk pinjaman KUR diharapkan dapat dikelola dengan baik sehingga mampu meningkatkan produktifitas dan pendapatan UMKM (Manopo, K. W., 2019).

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu wilayah administratif yang juga menjadi objek dari pelaksanaan program KUR. Jumlah peminjam Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kecamatan Sambit cukup banyak antara lain para petani dan UMKM. Akan tetapi terdapat permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Kecamatan Sambit yaitu tidak adanya pendampingan pada pelaku UMKM penerima KUR dalam menjalankan usaha mereka. Sehingga belum semua UMKM mengetahui betul bagaimana menggunakan

KUR tersebut. Memang banyak UMKM yang sudah menggunakan KUR, tetapi mereka tidak memahami bagaimana cara mengelola dana agar usahanya bisa berkembang dan bisa meningkatkan pendapatannya. Beberapa UMKM ada yang usahanya tidak berkembang sehingga mengalami kesulitan dalam mengembalikan pinjaman KUR. Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan bahwa kekurangan pelaksanaan Program KUR pemerintah selama ini adalah pelaku UMKM penerima KUR sering dilepaskan sendiri oleh pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun daerah tidak mendampingi penerima KUR dalam menjalankan usaha dan masih banyak pemegang KUR yang belum mendapat fasilitas pengembangan UMKM sehingga usaha mereka sulit untuk berkembang (CNN Ekonomi Indonesia, 2019).

Sembiring dan Suwetja (2018) menyatakan bahwa dalam memanfaatkan pinjaman modal KUR, penerapan akuntansi sangat diperlukan. Dengan menerapkan akuntansi dalam pengelolaan usaha dapat membangun kepercayaan pihak bank dalam memberikan pinjaman modal KUR terhadap pelaku UMKM sehingga pihak bank dapat melihat kelayakan dari proses usaha yang dijalankan dan dapat mengawasi perkembangan KUR yang telah dimanfaatkan oleh UMKM. Selain itu dengan adanya penerapan akuntansi juga dapat membantu UMKM dalam memperoleh berbagai informasi keuangan yang penting untuk menjalankan usahanya (Elisabeth & Paskah, 2015). Namun karena kurangnya pengetahuan akuntansi, masih banyak UMKM yang belum melakukan pencatatan atas laporan keuangannya dengan baik. Kebanyakan UMKM hanya mencatat jumlah uang yang diterima dan yang dikeluarkan, jumlah barang yang dibeli dan dijual, serta jumlah piutang/utang (Tambunan, 2019).

Pengetahuan terhadap akuntansi dapat membantu para pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan dengan benar, mengukur tingkat pendapatan dan pengeluaran dari usaha yang dijalankan, sehingga para pelaku UMKM dapat mengetahui keuntungan usahanya dengan tepat, serta pengelolaan dan akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih baik. Dari pengetahuan akuntansi pelaku usaha dapat mengetahui besarnya modal yang dimiliki serta dapat mengetahui perkembangan usahanya (Tambunan, 2019).

Penelitian ini merupakan penelitian kompilasi, di mana variabel-variabel yang digunakan dari beberapa penelitian terdahulu dan objek berbeda. Penelitian ini kompilasi dari penelitian Riawan dan Kusnawan (2018), Tambunan (2019) dan Wibowo, A., & Kurniawati, E. P. (2015). Adapun perbedaan dari penelitian lain terletak pada waktu dan objek penelitian. Dimana penelitian Riawan dan Kusnawan berdasarkan jumlah data UMKM Desa Patihan Kidul tahun 2018 yang dilakukan di Desa Patihan Kidul Kec. Siman Kab. Ponorogo, penelitian Tambunan berdasarkan jumlah data UMKM di Kelurahan Tanjung Rejo tahun 2019 yang dilakukan di Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal, dan penelitian Wibowo, A., & Kurniawati, E. P. berdasarkan jumlah data UMKM di Kec. Tingkir tahun 2015 yang dilakukan di Kecamatan Tingkir Kota Salatiga. Sedangkan penelitian ini berdasarkan jumlah data UMKM di Kec. Sambit tahun 2018 yang dilakukan di Kec. Sambit Kab. Ponorogo.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pengetahuan Akuntansi, Dan Penerapan Akuntansi Terhadap Pendapatan UMKM Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Kredit Usaha Rakyat terhadap pendapatan UMKM di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan akuntansi terhadap pendapatan UMKM di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana pengaruh penerapan akuntansi terhadap pendapatan UMKM di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?
4. Bagaimana pengaruh Kredit Usaha Rakyat, pengetahuan akuntansi, dan penerapan akuntansi terhadap pendapatan UMKM di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap pendapatan UMKM di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.
2. Mengetahui pengaruh pengetahuan akuntansi terhadap pendapatan UMKM di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.
3. Mengetahui pengaruh penerapan akuntansi terhadap pendapatan UMKM di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.
4. Mengetahui pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR), pengetahuan akuntansi, dan penerapan akuntansi terhadap pendapatan UMKM di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan Universitas khususnya mengenai kajian-kajian di bidang Kredit Usaha Rakyat yang berhubungan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

2. Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Penelitian ini dapat menambah informasi bagi UMKM sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan pendapatan yang berkaitan dengan modal pinjaman, penerapan pengetahuan akuntansi dan penerapan akuntansi.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai kendala dan dinamika UMKM baik pada wilayah internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pembiayaan dan kemampuan UMKM dalam pengelolaan keuangan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi mahasiswa lain yang mengadakan penelitian dengan topik yang berkaitan baik yang bersifat lanjutan maupun menyempurnakan.